

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendedikasikan Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang. Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program UP2K di Kelurahan Parupuk Tabing belum berjalan optimal dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Hal tersebut dilihat dari variabel yang dijelaskan George C. Edwards III yang mempengaruhi Implementasi Program seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Jika ditinjau dari aspek komunikasi, Sosialisasi program UP2K dari TP-PKK Kelurahan Parupuk Tabing kepada kelompok usaha dan masyarakat belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh. Hambatan utama terletak pada transmisi informasi yang sering kali terputus atau tidak menjangkau seluruh lapisan keluarga prasejahtera, serta kurangnya kejelasan petunjuk teknis operasional bagi para kader di lapangan. Hal ini menyebabkan terjadinya minim informasi yang membuat pemahaman masyarakat mengenai esensi program peningkatan pendapatan ini menjadi kurang optimal. Dari segi sumber daya manusia, para kader pelaksana dan pelaku usaha lokal masih minim mendapatkan pelatihan manajemen bisnis, inovasi produk, serta literasi keuangan digital. Sementara dari segi sumber daya finansial dan fasilitas, program UP2K di wilayah ini kekurangan modal stimulan yang berkelanjutan

serta belum memiliki sarana pemasaran (galeri/gerai fisik) yang memadai untuk menampung produk lokal.

Selanjutnya, variabel disposisi, sikap dan komitmen para pelaksana serta kader PKK di Kelurahan Parupuk Tabing pada dasarnya menunjukkan respons yang positif dan niat baik yang tinggi untuk membantu perekonomian warga. Namun, disposisi yang positif ini belum didukung oleh insentif yang memadai bagi para kader, sehingga motivasi kerja di lapangan sering kali mengalami penurunan dan belum mampu mendorong komitmen pelaku usaha untuk mandiri secara finansial. Kemudian aspek struktur birokrasi, pembagian kerja dan koordinasi dalam struktur pelaksana program UP2K sudah memiliki bagan organisasi yang jelas, namun mekanisme operasionalnya belum berjalan dinamis. Hambatan utama adalah belum tersedianya SOP yang jelas dan spesifik untuk wilayah Kelurahan Parupuk Tabing.

Oleh karena itu, secara keseluruhan Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Parupuk Tabing belum berjalan optimal dalam meningkatkan perekonomian keluarga karena terjebak pada pemenuhan aspek administratif normatif belaka. Program ini belum mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi produktif akibat lemahnya sinergi antara komunikasi yang jelas, keterbatasan sumber daya finansial dan keahlian, serta belum adanya SOP yang jelas. Akibatnya, dampak peningkatan pendapatan yang dirasakan oleh keluarga sasaran belum mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

6.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis mendalam mengenai hambatan implementasi Program UP2K di Kelurahan Parupuk Tabing, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi praktis yang ditujukan kepada para pemangku kebijakan sebagai berikut:

1. Bagi TP-PKK Kelurahan Parupuk Tabing

- a. Optimalisasi komunikasi: Mengubah pola sosialisasi dari sekadar pertemuan formal bulanan menjadi sosialisasi aktif. Kader PKK dapat memanfaatkan forum majelis taklim, arisan RT/RW, atau grup *WhatsApp* warga untuk menyebarkan informasi program secara berkala dengan bahasa yang lebih sederhana yang mudah dipahami.
- b. Peningkatan kapasitas internal: Menginisiasi forum belajar bersama antarkader secara swadaya atau mengundang pelaku UMKM lokal yang sukses untuk memberikan motivasi dan pelatihan dasar manajemen usaha, sebelum kader terjun mendampingi warga.
- c. Digitalisasi Pelaporan Administrasi Buku Wajib: Untuk mengatasi terbengkalainya pengisian buku wajib PKK akibat kelalaian manual, pengurus perlu menginisiasi sistem pencatatan digital sederhana. Hal ini memudahkan Ketua PKK untuk memantau pengisian Buku UP2K kapan saja tanpa harus terkendala kehadiran fisik di sekretariat.
- d. Mengubah Pola Komunikasi dari Insidental menjadi Berkelanjutan: TP-PKK Kelurahan harus menghentikan kebiasaan hanya menghubungi kelompok usaha lama saat menjelang perlombaan. Kader harus turun ke lapangan secara terjadwal untuk menjaring, mendata, dan membina

kelompok usaha baru (Poklak) dari kalangan keluarga prasejahtera agar terjadi pemerataan manfaat program.

2. Bagi Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kota Padang

- a. Penguatan kemitraan strategis: TP-PKK tingkat kota dan kecamatan harus bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan kelompok UP2K Kelurahan dengan Dinas Koperasi & UKM serta Dinas Perindustrian. Kemitraan ini difokuskan untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan teknis (kemasan produk, pemasaran digital, literasi keuangan) serta pengurusan izin usaha (P-IRT, NIB, dan sertifikasi Halal) secara kolektif dan gratis.
- b. Penyediaan sarana pemasaran: Membantu memfasilitasi pembuatan gerai fisik terpadu (Galeri UP2K) di tingkat kecamatan atau mengintegrasikan produk UP2K Parupuk Tabing ke dalam pameran/event resmi Pemko Padang secara berkala untuk memperluas pasar.

3. Bagi Pemerintah Kelurahan Parupuk Tabing (Lurah)

- a. Penyusunan SOP lokal: Menyusun SOP pelaksanaan UP2K yang spesifik untuk wilayah Parupuk Tabing melalui Keputusan Lurah. SOP ini harus memperjelas alur koordinasi, target sasaran keluarga prasejahtera yang diprioritaskan, serta indikator keberhasilan program yang terukur.
- b. Fasilitasi Ruang Promosi Produk Lokal: Kelurahan diharapkan dapat memfasilitasi pembuatan etalase fisik di kantor lurah atau membuat katalog digital (*e-catalog*) pada laman resmi kelurahan untuk membantu pemasaran produk kelompok UP2K warga Parupuk Tabing secara berkelanjutan.

4. Bagi Pemerintah Kota Padang

- a. Sinkronisasi hukum dan regulasi: Menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) atau instruksi khusus yang menyinkronkan Pedoman Umum UP2K Nasional ke dalam konteks lokal Kota Padang. Regulasi ini harus menegaskan kewajiban lintas dinas untuk melakukan pembinaan terpadu terhadap kelompok UP2K, sehingga program tidak lagi berjalan sendiri di bawah PKK.
- b. Alokasi dana stimulan berputar: Menyediakan pos anggaran khusus dalam APBD untuk bantuan modal usaha berputar yang dikelola dengan pengawasan ketat, serta memberikan insentif atau penghargaan finansial yang proporsional bagi kader PKK kelurahan berprestasi guna menjaga stabilitas motivasi kerja mereka di lapangan.

